

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Minta Klarifikasi Pembebasan Lahan MRT

KOMISI B DKI Jakarta akan meminta klarifikasi kepada eksekutif sebagai solusi mengenai lahan yang akan dibebaskan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Ancol Barat, Jakarta Utara sebagai depo kereta.

Rencananya, lahan seluas 20 hektare di sana akan dibebaskan senilai Rp 1,5 triliun kepada PT Asahimas Flat Glass, selaku pemegang surat Hak Pemanfaatan Lahan (HPL) dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, solusi atas persoalan itu sebetulnya akan dibahas dalam rapat kerja antara Komisi B dengan Pemprov DKI Jakarta. "Itu lahan di sana kepemilikannya seperti apa, maka itu kami juga mengundang DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) karena persoalan kepemilikan kan urusannya dengan surat, dan dinas itu yang

lebih berwenang," ujar Aziz, Selasa (21/7).

Aziz mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa lahan di Ancol Barat sebetulnya milik Jakpro yang dikerjasamakan dalam bentuk HPL dengan Asahimas. Lalu, sekarang, PT MRT Jakarta berencana akan membebaskan lahan tersebut kepada pihak ketiga itu.

"Dari satu BUMD (Jakpro) dijual ke pihak ketiga (Asahimas). Lalu BUMD lain (MRT Jakarta) beli dari pihak tersebut, terus untuk apa? Berarti ini pemborosan anggaran negara. Apalagi kalau belinya lebih mahal,

kalau lebih murah sih alhamdulillah karena ada penghematan," jelasnya.

Kehadiran mereka diperlukan agar PT MRT Jakarta, PT Jakpro, PT Bank DKI, dan PT Pembangunan Jaya Ancol, yang memiliki programnya masing-masing dapat saling bersinergi. (faf)



Bertajakarta.id